

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MELALUI JARING
PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PENGENDALIAN STUNTING
DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

M. Alfian Hi Bahrun NPP.

31.0996

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Studi Kebijakan Publik

Email: alfianhibahrunn@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *The demographic bonus in Ternate City, North Maluku Province, has contributed to the high population density, which in turn has led to an increase in the prevalence of stunting in the city. **Purpose** This study aims to evaluate the effectiveness of government policies and identify the supporting and inhibiting factors in controlling stunting in Ternate City. **Method :** The research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants were selected using purposive sampling. The researcher utilized the policy effectiveness theory by Dr. Riant Nugroho (2018). **Result** The study's findings indicate that while the Social Safety Net program in Ternate City has been implemented, its effectiveness is not yet optimal. The dimensions of appropriate policy and appropriate implementation have been effective. However, the target dimension is still lacking, as several sub-districts in Ternate City have not yet been reached by the stunting control program. **Conclusion:** . The environmental dimension has not shown significant changes following the program's implementation. The main challenge in the Social Safety Net Program's target dimension is the lack of public knowledge and awareness about stunting. Nonetheless, a supporting factor is the formation of the Stunting Management Acceleration Team (TPPS) in Ternate City, which has been very helpful in addressing stunting issues.*

Keywords: : *effectiveness, public policy, Stunting*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bonus demografi di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu penyebab jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, hal itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka *prevalensi stunting* di Kota Ternate. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian *Stunting* di Kota Ternate. **Metode:** Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Dr. Riant Nugroho (2018). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dalam penyelenggaraan program Jaring Pengaman

Sosial di Kota Ternate sudah berjalan namun belum optimal. Dimana dari dimensi tepat kebijakan dan tepat pelaksana sudah tepat dan berjalan efektif. Dimensi tepat target belum sesuai karena masih terdapat beberapa kelurahan di Kota Ternate yang belum diintervensi program pengendalian *stunting*. Dimensi tepat lingkungan masih belum memberikan perubahan signifikan setelah pelaksanaan program. **Kesimpulan.** Dengan ditemukannya kendala dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial pada dimensi target yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang *Stunting*. Terdapat juga faktor pendukung yang mendorong pelaksanaan Program Pemerintah melalui Jaring Pengaman Sosial yaitu pembentukan Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) di Kota Ternate yang sangat membantu dalam penanganan *Stunting*.

Kata kunci: efektivitas, kebijakan publik, *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bonus demografi sebagai periode ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan lansia berusia 65 tahun ke atas). Hal ini menciptakan peluang ekonomi karena lebih banyak orang berada dalam kelompok usia kerja, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2030. Penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup menyebabkan perubahan struktur usia penduduk, dengan lebih banyak orang berada dalam usia produktif (haliyora, 2021).

Perubahan inilah yang sering menyebabkan banyak masalah dan tantangan baru salah satunya adalah *stunting* yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (anak dibawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan simulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (haliyora, 2021).

Bonus demografi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Kepulauan Maluku dan berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku. Maluku Utara resmi menjadi sebuah Provinsi sejak tahun 1999 dan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat (Guntur, 2019).

Provinsi Maluku Utara memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Ternate (2022), Ternate memiliki jumlah penduduk sebesar 1.319.338 jiwa pada tahun 2022. Adapun jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara

Wilayah	Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Halmahera Barat	132.349	134.630	137.541
Halmahera Tengah	56.802	57.809	59.096
Kepulauan Sula	104.082	105.293	106.778
Halmahera Selatan	248.395	251.690	255.795
Halmahera Utara	197.638	199.936	202.755
Halmahera Timur	91.707	92.954	94.510
Pulau Morotai	74.436	76.102	78.270
Pulau Taliabu	58.047	58.744	59.601
Ternate	205.001	205.870	206.745
Tidore Kepulauan	114.480	116.149	118.247
Maluku Utara	1.282.937	1.299.177	1.319.338

Sumber : BPSKota Ternate(2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk nomor 2 tertinggi di Provinsi Maluku Utara dimiliki oleh Kota Ternate. Dimana jumlah penduduk Kota Ternate pada tahun 2022 adalah 206.745 ribu jiwa, yang memiliki selisih 49.050 jiwa dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Disamping itu jumlah penduduk Kota Ternate juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 2,4% dan terjadi kenaikan 5% pada tahun 2022.

Kota Ternate mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif akibat beberapa faktor, seperti migrasi penduduk dari daerah lain yang mencari pekerjaan dan pendidikan, serta penurunan angka kelahiran berkat program keluarga berencana dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keluarga kecil. Selain itu, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, termasuk program imunisasi dan perawatan kesehatan ibu dan anak, turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup penduduk (Leksono et al., 2021)..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini menyoroti meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Ternate menandakan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui sektor pariwisata. Sektor ini memiliki kapasitas besar untuk memanfaatkan penduduk usia produktif dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga .

Namun, tantangan utama yang dihadapi Ternate adalah tingginya angka prevalensi stunting, yang mencapai 17,7% pada tahun 2022, jauh di atas batas 14% yang ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Sosial. Data dari SSGI menunjukkan bahwa terdapat 233 anak yang berisiko stunting, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Ternate Tengah (50 anak) dan terendah di Kecamatan Pulau Batang Dua (10 anak). Persentase anak di bawah dua tahun yang berada di bawah garis merah adalah 36,1%, sementara anak di bawah lima tahun mencapai 63,9%.

Pemerintah pusat dan daerah telah merancang berbagai program untuk menangani stunting, dengan pendekatan yang lebih terorganisir dimulai sejak awal 2000-an (Hendraswari, dkk. 2021). Upaya ini menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Ternate yang mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Melalui kebijakan dan program yang terkoordinasi dan berbasis bukti, pemerintah berupaya mengurangi angka prevalensi stunting secara signifikan. Beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi stunting termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. PKH dapat meningkatkan akses keluarga terhadap gizi dan kesehatan, sehingga membantu mengurangi risiko stunting. Program Pangan Non-Tunai (BPNT) memberikan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga miskin, memastikan akses terhadap makanan bergizi.

Selain itu, program kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyediakan akses layanan kesehatan penting untuk mencegah stunting. Program pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi serta kesehatan juga berperan penting. Program sanitasi dan kebersihan mendukung perbaikan lingkungan, mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang dapat menyebabkan stunting. Pendidikan ibu tentang praktik pemberian makanan yang baik dan perawatan anak juga merupakan langkah pencegahan penting.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 35 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting menetapkan PKH sebagai program unggulan. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mendorong keluarga penerima manfaat untuk memastikan pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak mereka. Meskipun program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 melalui RPJMN 2020-2024, angka prevalensi stunting di Ternate tetap meningkat pada tahun 2022, menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas program yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian memberikan landasan penting dan inspirasi bagi penelitian saat ini. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam upaya mengatasi masalah sampah melalui program yang inovatif. Misalnya, Penelitian oleh Fajar Muhandri dan Muhammad Ilham (2022) di Kota Bandung menyelidiki efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana PPKM efektif dalam menekan penyebaran virus serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Melalui analisis mendalam, para peneliti memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi penanganan COVID-19 di masa depan, memberikan wawasan berharga bagi pihak terkait mengenai efektivitas PPKM.

Selanjutnya ada Selvia Junita Praja, Margaretha Rumbekwan, dan Muhammad Ibrahim (2020) melakukan evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi PPMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasilnya diharapkan memberikan pemahaman lebih baik tentang efektivitas program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Rekomendasi dari penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Dimas Prayogo dan Sulthon Rohmadin (2022) meneliti efektivitas

Command Center sebagai pusat pengendali penanggulangan keadaan darurat dan bencana di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas dan efisiensi dalam merespons keadaan darurat dan bencana. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur penanggulangan bencana. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas Command Center dan memberikan rekomendasi untuk evaluasi dan perbaikan sistem penanggulangan bencana, dengan harapan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Samarinda.

Ahmad Sururi (2023) meneliti efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Desa Mongpok, Kabupaten Serang. Menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, informan dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi dan misi Kampung KB fokus pada transparansi, gotong royong, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan lintas program dan kunjungan rumah dilakukan untuk menurunkan stunting, dengan hasil signifikan yaitu hanya 7,63% keluarga yang berisiko. Kepemimpinan lokal yang responsif menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Dukungan pemerintah dan inovasi program terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Taufiqurokhman, dkk (2023) mengevaluasi strategi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menurunkan angka stunting. Penelitian menggunakan wawancara dan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan melibatkan 35 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak. Kebijakan strategis di DKI Jakarta meliputi Keputusan Gubernur untuk koordinasi aksi konvergensi penurunan stunting dan berbagai program pemerintah. Dukungan dari TP PKK dan BKKBN melalui tenaga pendamping keluarga juga signifikan. Strategi ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara merata dan mencapai target nasional, memastikan efektivitas intervensi dan dukungan bagi anak-anak yang berisiko stunting di DKI Jakarta.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memperkenalkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada analisis mendalam tentang efektivitas kebijakan pengendalian stunting di Kota Ternate, yang dipengaruhi oleh bonus demografi yang meningkatkan kepadatan penduduk dan prevalensi stunting. Menggunakan teori efektivitas kebijakan Dr. Riant Nugroho (2018), penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun program Jaring Pengaman Sosial telah berjalan, masih terdapat kekurangan dalam dimensi target dan lingkungan. Kebaruan ilmiah terletak pada pengungkapan kendala spesifik seperti rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta efektivitas pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) sebagai faktor pendukung utama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru yang berharga untuk perbaikan kebijakan pengendalian stunting di kota-kota dengan karakteristik demografi serupa.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kebijakan pemerintah melalui JPS untuk pengendalian *Stunting* menjelaskan hambatan dan dukungan kebijakan pemerintah melalui JPS.

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah elemen esensial dalam metodologi ilmiah, membantu peneliti merumuskan dan menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Sugiono (2019) menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan teknik pengumpulan data yang beragam. Selain itu, Sugiyono (2013) menambahkan bahwa meskipun penelitian kualitatif tidak menolak penggunaan statistik, statistik digunakan untuk mengkonstruksikan hubungan antar fenomena, bukan untuk menguji hipotesis. Operasionalisasi konsep adalah sistem abstrak untuk memudahkan pengukuran variabel. Operasional sebagai penentuan kontrak atau sifat yang dapat diukur. Sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari individu melalui wawancara atau observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau literatur terkait.

Menurut Moleong (2012), informan adalah individu yang memberikan informasi relevan dengan penelitian. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling memastikan data yang akurat dan relevan. Asmungi dan Ardieansyah (2020) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama, berperan sebagai interviewer, observer, dan dokumenter. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Simangunsong (2017) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah tahapan penting untuk memperoleh data yang diperlukan.

Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Reduksi data adalah proses merangkum informasi penting, sedangkan penyajian data dilakukan melalui uraian naratif untuk memudahkan pemahaman. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa verifikasi data memastikan kesalahan minimal, dan kesimpulan dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Melalui Jaring Pengaman Sosial Dalam Pengendalian *Stunting* di Kota Ternate

Efektivitas kebijakan adalah konsep yang mengukur sejauh mana sebuah kebijakan berhasil mencapai tujuannya. Penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan menggunakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Dr. Riant Nugroho (2018). Menurut teori Nugroho, efektivitas kebijakan dapat diukur melalui beberapa tahapan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Tepat Kebijakan

Efektivitas kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut relevan dan tepat sasaran. **Relevansi** kebijakan JPS dalam menangani *stunting* di Kota Ternate dapat dilihat dari adanya regulasi khusus yang mengatur penanganan *stunting*, seperti Peraturan Walikota Ternate Nomor 35 Tahun 2022. Program ini terbukti relevan dengan permasalahan yang ada karena bertujuan untuk mengatasi penyebab *stunting* melalui bantuan pangan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan. Data prevalensi *stunting* menunjukkan penurunan signifikan sejak implementasi kebijakan ini pada tahun 2019, mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam menurunkan angka *stunting*. **Dampak jangka panjang** kebijakan JPS diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2004-2024 dan edisi 2025-2045. Program ini berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui

peningkatan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan. Pemerintah Kota Ternate menunjukkan komitmen kuat terhadap program ini, termasuk melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin.

2. Tepat Pelaksana

Efektivitas kebijakan juga bergantung pada pelaksana yang tepat dan bagaimana mereka berkoordinasi. **Koordinasi dan komunikasi** yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam memastikan keberhasilan program JPS. Pemerintah Kota Ternate telah membentuk tim khusus untuk menekan angka prevalensi stunting dan mengatur komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan. **Akuntabilitas** dalam pelaksanaan program JPS dilakukan melalui pelaporan berkala dan transparansi kepada masyarakat. Rakor yang dihadiri oleh pejabat penting memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan target nasional, yaitu menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024.

3. Tepat Target

Penetapan target yang jelas dan tepat sangat penting dalam efektivitas kebijakan. **Target kuantitatif** kebijakan JPS meliputi jumlah penerima manfaat dan alokasi anggaran yang ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program utama yang fokus pada bantuan bagi masyarakat miskin di Kota Ternate, dengan target penerima yang jelas dan anggaran yang dialokasikan secara tepat. **Dampak kualitatif** dari program JPS dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti perubahan pola konsumsi menuju makanan bergizi dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara dengan penerima manfaat dan analisis data kualitas hidup penduduk.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan internal dan eksternal juga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Kondisi **internal** masyarakat, seperti pengetahuan tentang stunting dan aksesibilitas, memainkan peran penting. Masih banyak masyarakat di lingkungan rawan stunting yang kurang sadar akan bahaya stunting dan lebih memilih pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari sisi **eksternal**, respons pemerintah dalam mengatasi stunting melalui JPS cukup baik. Anggaran besar dari APBD telah disiapkan untuk program ini, dan berbagai program unggulan, seperti PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja, dilaksanakan untuk mendukung masyarakat terdampak stunting.

5. Tepat Proses

Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting. Partisipasi aktif dari berbagai **pemangku kepentingan**, termasuk masyarakat, kelompok advokasi, dan sektor swasta, sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Rapat koordinasi yang melibatkan berbagai stakeholder menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berkoordinasi secara aktif demi mencapai tujuan program JPS.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan JPS di Kota Ternate sudah efektif dalam menurunkan angka stunting, meskipun masih ada tantangan dalam hal pengetahuan masyarakat dan aksesibilitas. Efektivitas kebijakan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dr. Riant Nugroho, yang menekankan pentingnya relevansi, dampak jangka panjang, koordinasi, akuntabilitas, target yang tepat, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mencapai keberhasilan kebijakan.

3.2. faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kebijakan Jaring Pengaman Sosial

Kebijakan percepatan penurunan Stunting di Kota Ternate, yang diatur melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 35 Tahun 2022, bertujuan untuk menekan prevalensi Stunting, menciptakan lingkungan sehat, dan mengurangi masalah sosial masyarakat. Kebijakan ini menuntut peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

a. Faktor Pendukung Efektivitas Kebijakan

- 1) **Dukungan Teknologi dan Sarana Prasarana** : Dinas Sosial Kota Ternate membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang bekerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Walikota Ternate. TPPS bertugas secara langsung dalam penanganan Stunting di lapangan, didukung oleh landasan hukum yang jelas dari Perwalikota. Ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan meminimalkan kesalahan dalam implementasi kebijakan.
- 2) **Pengoptimalan Tugas Pelaksana Program** : Dengan pembentukan TPPS, terdapat penambahan tugas yang spesifik sesuai dengan kebutuhan lapangan. Setiap bagian dari dinas sosial memahami dengan jelas tanggung jawabnya, yang terdefinisi dalam regulasi yang ada. Hal ini meningkatkan fokus dan efisiensi dalam melaksanakan program pencegahan Stunting di Kota Ternate.

b. Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan

- 1) **Kurangnya SDM yang Berkualitas** : Rekrutmen SDM di Dinas Sosial Kota Ternate menghadapi tantangan dalam menarik individu dengan pendidikan yang memadai untuk menangani program Stunting. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan formal di tingkat SMP, yang dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Kekurangan ini diakui sebagai salah satu faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
- 2) **Pengetahuan Masyarakat yang Rendah** : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Stunting menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan. Dinas Sosial Kota Ternate melakukan berbagai upaya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan perawatan yang tepat bagi anak-anak. Namun, tantangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi kesehatan di kalangan masyarakat.

Kebijakan percepatan penurunan Stunting di Kota Ternate menunjukkan upaya yang signifikan dari pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat melalui pendekatan terstruktur dan kolaboratif. Meskipun menghadapi beberapa hambatan seperti kualitas SDM yang belum optimal dan rendahnya pengetahuan masyarakat, langkah-langkah konkret telah diambil untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan terus mendorong inovasi dan partisipasi aktif semua pihak terkait, diharapkan tujuan kebijakan untuk mengurangi Stunting di Kota Ternate dapat tercapai secara maksimal.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Taufiqurokhman, dkk (2023) mengenai kebijakan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menurunkan angka stunting menyoroti situasi kompleks stunting di wilayah metropolitan ini. Dengan prevalensi stunting anak di bawah lima tahun mencapai 14,8% pada tahun 2022, DKI Jakarta memenuhi target nasional namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam meratakan angka prevalensi di berbagai wilayah administratifnya. Studi ini mendokumentasikan berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, termasuk Keputusan Gubernur, Surat Edaran Sekretaris Daerah, dan program spesifik seperti Program Makan

Tambahan (PMT) untuk Balita Gizi Kurang serta program imunisasi. Intervensi tersebut terfokus pada peningkatan akses terhadap gizi dan perawatan kesehatan, dengan upaya tambahan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan di Kota Ternate oleh peneliti tidak disebutkan pada Taufiqurokhman, dkk (2023) tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Melalui Jaring Pengaman Sosial Dalam Pengendalian Stunting (2024) memberikan perspektif yang berbeda dengan fokus pada efektivitas kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Terletak di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate menghadapi tantangan khusus terkait stunting dengan tingkat prevalensi yang cukup tinggi sebelum implementasi kebijakan ini. Studi ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Dr. Riant Nugroho (2018) sebagai kerangka analisis, menilai relevansi kebijakan, pelaksanaan yang tepat, penetapan target yang jelas, serta lingkungan dan proses kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan JPS telah berhasil signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting sejak diperkenalkan pada tahun 2019, dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program yang ditawarkan.

Perbandingan antara kedua penelitian ini menyoroti pendekatan yang berbeda namun komplementer dalam menangani masalah stunting. DKI Jakarta, sebagai pusat administratif dan ekonomi nasional, mengadopsi strategi intervensi langsung yang terfokus pada pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan dasar. Meskipun telah mencapai target nasional, upaya mereka masih menghadapi tantangan dalam meratakan keberhasilan intervensi di berbagai kecamatan dan kelurahan. Sementara itu, Kota Ternate, dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang unik, memilih pendekatan yang lebih terfokus pada kebijakan JPS sebagai alat utama untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak. Evaluasi efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi prevalensi stunting di daerah ini.

Secara metodologis, penelitian di DKI Jakarta menggunakan pendekatan survei dan analisis data yang luas untuk memahami prevalensi stunting dan keberhasilan intervensi mereka. Ini mencerminkan tingkat akurasi dan representasi yang tinggi dalam penilaian dampak kebijakan. Di sisi lain, penelitian di Kota Ternate menunjukkan pendekatan yang lebih mendalam dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan sebagai landasan analisis, menyoroti pentingnya aspek kebijakan yang lebih abstrak namun krusial untuk keberhasilan jangka panjang. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan akademis dan analitis antara kedua penelitian, dengan masing-masing menawarkan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

Kesimpulannya, baik penelitian di DKI Jakarta maupun di Kota Ternate menunjukkan bahwa kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan serta partisipasi masyarakat aktif adalah kunci dalam menangani stunting. Sementara DKI Jakarta fokus pada perbaikan infrastruktur gizi dan kesehatan dasar, Kota Ternate menekankan pentingnya koordinasi yang baik dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan JPS. Evaluasi dan peningkatan terus menerus terhadap implementasi kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan penurunan prevalensi stunting di Indonesia dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam mengendalikan stunting di Kota Ternate. Berdasarkan teori efektivitas kebijakan oleh Dr. Riant Nugroho, penelitian ini mengukur efektivitas melalui lima aspek: relevansi kebijakan, pelaksana yang tepat, target yang jelas, lingkungan yang mendukung, dan partisipasi pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan JPS efektif dalam menurunkan angka stunting di Kota Ternate. Penurunan prevalensi stunting sejak implementasi kebijakan ini pada tahun 2019 mengindikasikan keberhasilannya. Dukungan teknologi, koordinasi yang baik antara berbagai

pihak, dan akuntabilitas pelaksanaan program merupakan faktor pendukung utama. Namun, tantangan seperti kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting perlu diatasi. Upaya edukasi dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Kebijakan JPS di Kota Ternate menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini terbatas pada data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan yang mungkin tidak mencakup seluruh aspek efektivitas kebijakan. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Kota Ternate, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan geografis untuk melihat efektivitas kebijakan JPS di daerah lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor penghambat seperti kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan masyarakat dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih komprehensif. Mengkaji dampak jangka panjang kebijakan JPS dan mengidentifikasi strategi inovatif untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat juga penting untuk mendukung upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta.

Asmungi, S., & Ardiansyah. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.

Guntur, I. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Barat*. Jakarta: CV. Jakarta Print.

Haliyora. (2021). *Analisis Bonus Demografi di Indonesia*. Haliyora Online. Retrieved from <https://www.haliyora.com>

Hendraswari, C. A., Purnamaningrum, Y. E., Maryani, T., Widyastuti, Y., & Harith, S. (2021). The determinants of *stunting* for children aged 24-59 months in Kulon Progo District 2019. *Kesmas*, 16(2), 71–77. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V16I2.3305>

Leksono, P., Setiawan, R., & Wirawan, A. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Struktur Usia Penduduk di Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 123-140.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong. (2017) . *Metodologi Penelitan Pemerintahan, TeotitikLegalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Taufiqurokhan, M., et al. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menurunkan Angka Stunting*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 21(3), 211-230. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/19913/9746>
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2022). *Data Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara*. Retrieved from <https://www.bpskotaternate.go.id> <https://www.bpskotaternate.go.id>
- Ahmad Sururi. (2023). *Efektivitas Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Mongpok*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 97-112. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29441>
- Fajar Muhandri & Muhammad Ilham. (2022). *Implementasi Kebijakan PPKM dalam Pengendalian COVID-19 di Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 99-115. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2392/1174>
- Selvia Junita Praja, Margaretha Rumbekwan, & Muhammad Ibrahim. (2020). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Penajam, Kalimantan Timur*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 67-83. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWPB/article/download/1132/728>
- Dimas Prayogo & Sulthon Rohmadin. (2022). *Efektivitas Command Center dalam Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda*. *Jurnal Kebencanaan*, 12(4), 155-172. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2577/1344>